

## Aksentuasi Pilkada Partisipatif Terhadap Kalangan Pemuda di Tanjung Dapura, Kota Makassar

Abdul Rahman\*<sup>1</sup>, Ririn Nurfaathirani Heri<sup>2</sup>, Heri Tahir<sup>3</sup>, Nurlela<sup>4</sup>, Jumadi<sup>5</sup>

<sup>1,4</sup>Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

<sup>2,3</sup>Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

<sup>5</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

\*e-mail: [abdul.rahman8304@unm.ac.id](mailto:abdul.rahman8304@unm.ac.id)<sup>1</sup>, [rinnurfah@unm.ac.id](mailto:rinnurfah@unm.ac.id)<sup>2</sup>, [profheritahir@gmail.com](mailto:profheritahir@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nurlela@unm.ac.id](mailto:nurlela@unm.ac.id)<sup>4</sup>, [jumadi@unm.ac.id](mailto:jumadi@unm.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstract

*Youth as the next generation of the nation's ideals actually have an important role in the nation's progress. Youth must have an active role in making changes and strengthening democracy. One thing that young people can do to strengthen democracy is through their participation in regional head elections (pilkada). However, based on data released by BBC News Indonesia, it was found that there was an attitude of young people who identified themselves as white who did not want to be caught up in the hustle and bustle of electoral politics. This phenomenon must be addressed by higher education academics by providing education to young people so they can actively participate in the democratic process through regional elections. The aim of this activity is to provide youth with an understanding of the importance of regional elections. The activity partners are young people in Tanjung Dapura. The methods used are lectures and discussions. This activity was taken seriously by young people, and they are committed to taking part in the regional election process, and casting their votes on November 27, 2024.*

**Keywords:** Democracy, Pilkada, Youth

### Abstrak

*Pemuda sebagai generasi penerus cita-cita bangsa sejatinya mempunyai peranan penting dalam kemajuan bangsa. Pemuda harus mempunyai peran aktif dalam melakukan perubahan dan penguatan demokrasi. Salah satu yang bisa dilakukan oleh pemuda dalam memperkuat demokrasi ialah melalui partisipasi mereka dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Akan tetapi, berdasarkan data yang dirilis oleh BBC News Indonesia, ditemukan adanya sikap pemuda yang mengidentifikasi diri mereka sebagai golongan putih yang tidak mau terjebak dalam hiruk pikuk politik elektoral. Fenomena tersebut mesti disikapi oleh insan akademik perguruan tinggi dengan cara memberikan penyuluhan kepada pemuda agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi melalui pilkada. Tujuan kegiatan ini ialah memberikan pemahaman kepada pemuda akan pentingnya pilkada. Adapun mitra kegiatan ialah para pemuda di Tanjung Dapura. Metode yang digunakan ialah ceramah dan diskusi. Kegiatan ini diikuti dengan serius oleh pemuda, dan mereka berkomitmen untuk berperan serta dalam proses pilkada, dan menyalurkan suara mereka pada 27 November 2024.*

**Kata kunci:** Demokrasi, Pemuda, Pilkada

## 1. PENDAHULUAN

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *demokratia*, yang terdiri atas kata *demos* yaitu rakyat, dan *kratos* yaitu kekuatan, kekuasaan, dan pemerintahan sehingga diartikan sebagai pemerintahan rakyat (Miranti & Bahri, 2023). Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat mendefinisikan demokrasi sebagai *government of the people, by the people, for the people* (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) (Harefa & Hulu, 2020). Lebih lanjut Hans Kelsen juga mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat dan untuk rakyat, meskipun dalam praktiknya, pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang memiliki posisi sebagai perwakilan rakyat yang telah dipilih berdasarkan prosedur yang berlaku (Yanti et al., 2021).

Indonesia hingga saat ini masih dilekatkan sebagai negara demokrasi, karena ukuran yang diambil ialah adanya kebebasan pers, pemilihan jabatan Presiden, Gubernur, Bupati, Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Partisipasi politik rakyat dalam menentukan arah perjalanan bangsa, negara dan pemerintahan hanya sebatas itu. Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat pada umumnya menganggap dengan sistem demokrasi yang dilaksanakan tentu akan berorientasi pada kelahiran kehidupan rakyat yang lebih baik, yaitu kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Harus diakui bahwa derap demokrasi Indonesia pasca keruntuhan Orde Baru berjalan sangat lamban (Rahman, 2022). Meski demikian, apa yang telah dicapai oleh bangsa ini semestinya menjadi semacam tonggak dalam mengidentifikasi dan menyempurnakan celah-celah kelemahan demokrasi di Indonesia .

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan berada dalam kendali rakyat. Dalam sistem demokrasi, hukum dijadikan sebagai sarana penjaga keadilan dan kebebasan individu dalam tata tata pergaulan masyarakat. Meskipun perjalanan demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sejak keruntuhan Orde Baru, tetapi dalam dinamikanya masih menyisakan kelemahan di antaranya ialah kurangnya partisipasi masyarakat (Zuhro, 2021). Dipahami bahwa keberfungsian demokrasi dalam masyarakat secara maksimal hanya bisa tercapai ketika didukung oleh partisipasi masyarakat. Namun, di Indonesia, masih jarang terjadi keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan penegakan hukum. Hal ini tentu dapat memunculkan kekhawatiran, jangan sampai kebijakan dan sistem tata hukum yang disusun tidak berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk memperkuat keberlangsungan demokrasi di Indonesia, maka diperlukan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, pelibatan masyarakat dalam memperkuat demokrasi menemukan momentumnya pada tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan bahwa hari Rabu, 27 November 2024 akan dilangsungkan pemungutan suara untuk memilih Kepala Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di berbagai wilayah Indonesia. Peristiwa tersebut tentu merupakan pertarungan bagi kualitas demokrasi Indonesia. Jika demokrasi hanya dipahami sebatas perebutan kuasa di medan politik, dipastikan kualitas demokrasi mengalami stagnasi. Inilah bentuk pendangkalan demokrasi paling klasik. Demokrasi dimanfaatkan oleh para kumpulan orang-orang yang hanya mencari keuntungan. Sebaliknya, jika demokrasi dipahami dan diimplementasikan sebagai keseluruhan sistem berbangsa dan bernegara menuju sebuah tatanan kehidupan yang lebih beradab, dan sejahtera lahir bathin, barulah peningkatan kualitas demokrasi dapat dirasakan (Dewi et al., 2022).

Membicarakan demokrasi artinya memerlukan perangkat prosedur. Lewat prosedur ini, para pengguna demokrasi membingkai diri, misalnya partai politik sebagai pengusung yang akan berkontestasi pada pilkada, penyelenggara pilkada, termasuk rakyat sebagai pemilik hak suara (Rizal, 2022). Pengguna sistem pilkada kemudian membingkai diri untuk tunduk dan mematuhi segala peraturan dan ketetapan yang berkaitan dengan pilkada. Dalam pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024, pemerintah bersama penyelenggara pilkada secara tegas menyatakan bahwa pilkada harus berjalan secara demokratis dan bermartabat. Pilkada sebagai pesta demokrasi yang melibatkan rakyat harus berjalan sukses tanpa mendapat perusakan dari racun demokrasi misalnya tekanan, intimidasi, ketidaknetralan aparat pemerintah maupun aparat keamanan. Rakyat sebagai pemilik hak suara harus mendapatkan jaminan keamana dan jaminan konstitusional dalam menyalurkan hak pilihnya.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia harus senantiasa dirawat. Pelaksanaan pilkada merupakan salah satu cara untuk merawat demokrasi. Pilkada merupakan bagian pengawasan masyarakat terhadap mereka yang terpilih atau penerima mandat dari masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bingkai sistem ketatanegaraan, termasuk memberikan jaminan kebebasan dalam menganut agama dan kepercayaan. Pilkada merupakan ruang kebebasan dalam menyampaikan suara dan

ekspresi dalam menentukan pilihan-pilihan, memberikan penilaian terhadap program-program yang relevan, bahkan menuntut apakah aspirasi diterima oleh mereka yang menerima mandat, untuk kemudian disusun dalam kampanye atau program-program yang dapat diukur oleh pemilih (Rizal, 2022).

Pilkada merupakan arena dari kontestasi dan kompetisi, maka ini sebenarnya juga arena bagi rakyat untuk memberikan kesempatan kepada setiap individu warga negara untuk turut ambil bagian untuk berkompetisi sekaligus berkolaborasi secara demokratis dan bermartabat. Pilkada harus dimaknai sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di ranah lokal. Dengan demikian pilkada akan dinikmati sebagai sarana untuk mempererat persatuan, karena kontestan yang tampil sebagai pihak yang menang atau pihak yang kalah akan bersama-sama memikul beban yang tidak berbeda jauh dalam menjaga dan merawat keutuhan NKRI di tingkat lokal (Dewanti & Sari, 2021).

Pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung secara serentak pada 27 November 2024 diharapkan dapat berlangsung dengan sukses. Kesuksesan pilkada salah satunya ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih. Salah satu hal yang selalu membayangi sebuah pemilu ataupun pilkada adalah masih adanya rakyat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jika melihat data, angka partisipasi pemilih pada pemilu nasional yang berlangsung pada 14 Februari 2024 berada pada kisaran 83,6 persen (Ismi, 2024). Data ini menunjukkan bahwa masih ada pemilik hak suara yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 16.4 persen .

Salah satu daerah yang akan melaksanakan pilkada ialah Kota Makassar. Masyarakat di kota ini akan melakukan pemilihan Gubernur dan Walikota. Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad dan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi. Sementara itu untuk pemilihan Walikota Makassar diikuti oleh empat pasangan calon yaitu: Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika, Andi Seto Gadhista Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi, Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi, dan Amri Arsyid-Abdul Rahman Bando. Mereka yang tampil sebagai kontestan tentu merupakan putra-putri terbaik Sulawesi Selatan. Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur akan bersaing untuk memperebutkan suara pemilih sebanyak 6.680.807, dan pasangan calon Walikota-Wakil Walikota memperebutkan suara pemilih sebanyak 1.037.164.

Kota Makassar yang diikuti oleh empat pasangan calon merupakan pemilik suara pemilih yang paling banyak. Pemilik hak suara di Kota Makassar didominasi oleh generasi milenial atau pemuda. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menargetkan partisipasi masyarakat pada pilkada 2024 bisa mencapai angka 70 persen. Olehnya itu sejak jauh hari, KPU Kota Makassar gencar melakukan sosialisasi, khususnya kepada generasi muda dan pemilih pemula. Pemilih pemula digaet dengan melakukan kegiatan *Goes to School*. Program ini tentu relevan dengan pernyataan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa generasi muda mempunyai peranan penting dalam pesta demokrasi pilkada, dalam arti bahwa generasi muda merupakan pemilik suara yang menentukan maju mundurnya kehidupan bangsa di masa yang akan datang (Mutmainah et al., 2023).

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemuda pada pilkada yang akan datang, maka kampus pun memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan pesta demokrasi itu, khususnya di Kota Makassar. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagaimana yang sering terjadi, permasalahan yang muncul pada setiap ajang pemilu atau pilkada, masih ada kalangan yang tidak menyadari akan pentingnya partisipasi dalam berdemokrasi, sehingga tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Pada kegiatan pengabdian kali ini, sasaran atau mitra pengabdian ialah para pemuda yang bermukim di kawasan Tanjung Dapura, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemuda yang bermukim di Tanjung Dapura untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 yang akan datang. Berdasarkan tujuan itu, maka diharapkan hasil pengabdian ini dapat menumbuhkan kesadaran di kalangan pemuda bahwa

pilkada merupakan arena untuk merawat demokrasi sehingga setiap warga negara, termasuk para pemuda harus terlibat aktif dalam proses perawatan demokrasi di negara ini, khususnya di Kota Makassar.

## 2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di salah satu rumah peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh para pemuda, baik perempuan maupun laki-laki yang bermukim di Tanjung Dapura. Kegiatan pengabdian ini diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan yaitu menumbuhkan kesadaran bagi para pemuda/pemudi yang bermukim di Tanjung Dapura untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Partisipasi yang dimaksud bukan sekadar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos salah satu kontestan, tetapi turut pula menjaga keamanan, ketertiban, kondisivitas sepanjang tahapan pilkada berlangsung, mulai dari tahapan penetapan calon sampai pada penetapan kepala daerah terpilih. Agar pelaksanaan pengabdian dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka tim pengabdian melakukan beberapa tahapan atau metode pelaksanaan demi tercapainya tujuan pengabdian ini. Adapun metode yang dimaksud dapat dilihat dalam uraian berikut ini

### a. Tahap Persiapan

Sebelum melakukan kegiatan pengabdian terhadap mitra sasaran yang telah ditentukan, maka tim pengabdian melakukan diskusi terbatas terkait materi yang hendak disampaikan, melakukan kajian literatur yang terkait dengan topik pengabdian, melakukan pengurusan izin pelaksanaan kegiatan, dan sosialisasi rencana kegiatan pada pihak mitra sasaran.

### b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada Kamis 15 Agustus 2024, yang terdiri atas lima orang tim yang memiliki keahlian dalam bidang sejarah politik Islam, sosiologi politik, dan ilmu hukum. Peserta kegiatan terdiri atas pemuda dari kalangan perempuan dan laki-laki sejumlah 21 orang. Materi kegiatan disampaikan oleh dua orang tim pengabdian yang bertindak sebagai narasumber. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah selama 30 menit. Setelah itu dilakukan diskusi dan tanya jawab antara narasumber dengan para peserta kegiatan.



Gambar 1. Peserta Kegiatan

c. Evaluasi

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengabdian ini maka tim membagikan angket kepada peserta. Jika ada peserta yang kurang memahami pertanyaan di angket tersebut, maka mahasiswa sebagai tim pendamping pengabdian akan membantu. Adapun hasil yang diperoleh dari angket tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1. Evaluasi Kegiatan PKM

Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
Pilkada Penting	21	0	0
Tidak boleh golput	21	0	0
Kegiatan PKM Penting bagi mereka	21	0	0
Materi sangat mudah dipahami	21	0	0
Tim PKM yang Komunikatif	21	0	0
Bersedia mengikuti kegiatan PKM selanjutnya	19	0	2

Berdasarkan data di atas, maka kegiatan PKM ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari kerjasama tim pengabdian dan dukungan dari para pemuda sebagai peserta kegiatan. gunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam kegiatan pengabdian. Hasil pengabdian itu harus dapat diukur dan penulis diminta menjelaskan alat ukur yang dipakai, baik secara deskriptif maupun kualitatif. Jelaskan cara mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian. Tingkat ketercapaian dapat dilihat dari sisi perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat sasaran.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilkada merupakan singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada merupakan ajang pemilihan yang dilakukan secara bersamaan oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Penyelenggaraan pilkada dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Sementara pengawasannya dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pemilihan Kepala Daerah ini dilaksanakan secara paket dengan pemilihan wakil kepala daerah. Adapun kepala daerah yang dimaksud ialah Gubernur/Wakil Gubernur di tingkat provinsi, Bupati/Wakil Bupati di tingkat kabupaten, dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat kota.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu tolok ukur keikutsertaan warga secara aktif dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan kata lain, pilkada merupakan sarana konkret bagi suatu warga dalam suatu negara dalam proses kehidupan bernegara, sekaligus tolok ukur dari sebuah demokrasi. Hasil pilkada yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan partisipasi dan kebebasan masyarakat.

Pemilihan kepala daerah merupakan peristiwa penting bagi kemajuan daerah dan kesuksesannya sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat. Menurut Ririn Nurfaathirany Hery sebagai salah satu pameri menegaskan bahwa, kesuksesan masyarakat di Kota Makassar memilih gubernur/wakil gubernur dan walikota/wakil walikota sangat tergantung bagaimana partisipasi mereka, karena partisipasi yang tinggi merupakan pencerminan kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap proses pilkada. Ketika masyarakat, termasuk pemuda berperan serta, baik di dalam memilih maupun

dalam melakukan pengawasan mulai dari tahapan penetapan calon hingga penetapan pemenang, maka hasil yang dicapai tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat.

Generasi muda diharapkan memiliki keterlibatan secara luas dalam proses pilkada, sebab pemuda memiliki potensi yang sangat besar dari segi kemampuan melakukan mobiltas sekaligus terampil dalam memanfaatkan teknologi informasi (Sutriawan et al., 2023). Dengan kemampuan yang dimilikinya itu, maka pemuda yang berperan aktif dapat mengurangi resiko kecurangan dan manipulasi. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat, khususnya pemuda akan menghasilkan pemimpin yang akuntabel sesuai dengan harapan rakyat, sehingga mampu menggerakkan roda pembangunan dan pemerintahan di Sulawesi Selatan pada umumnya, dan di Kota Makassar secara khusus.

Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 merupakan suatu hajatan demokrasi yang memiliki peran penting bagi masyarakat di Kota Makassar. Melalui pilkada, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat menyerap kepentingan mereka demi tercapainya kemakmuran. Pilkada juga menghadirkan manfaat yang penting bagi masyarakat Kota Makassar dalam upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Salah satu manfaat penting pilkada bagi masyarakat Kota Makassar adalah sebagai ajang untuk meyalurkan aspirasi politik mereka. dengan adanya pilkada, pemuda memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin di tingkat provinsi maupun kota yang dinilai mampu membawa masyarakat ke arah kemakmuran dan kesejahteraan. Selain itu, pilkada juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memengaruhi kebijakan politik yang berdampak pada pembangunan daerah.

Pilkada juga menghadirkan manfaat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi dalam proses politik merupakan hal penting dalam memperkuat bangunan demokrasi. Melalui pilkada, masyarakat diajak untuk terlibat secara aktif dalam pesta demokrasi dalam memilih pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi daerah, dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Dengan demikian, pilkada merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Adapun manfaat pilkada secara rinci, dapat dilihat pada uraian berikut ini:

a. Mewujudkan kedaulatan rakyat

Dalam pelaksanaan pengabdian ini, para pemuda sebagai peserta kegiatan diberikan pemahaman bahwa pilkada bermanfaat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pilkada merupakan arena bagi masyarakat untuk menunjukkan kedaulatannya dalam menentukan jalannya roda pemerintahan di tingkat daerah. Melalui pilkada, para pemuda sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dalam memilih pemimpin yang amanah. Pilkada memungkinkan semua warga Kota Makassar, termasuk para pemuda untuk ikut serta menentukan pemimpin di tingkat provinsi dan kota.

b. Mendorong partisipasi politik

Pilkada merupakan arena untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam menentukan arah pemerintahan. Partisipasi dalam pilkada bukan sekadar menyalurkan hak suara di TPS, tetapi juga dapat dijadikan kesempatan oleh pemuda dalam menggali informasi yang terkait dengan pasangan calon, misalnya latar belakang perjalanan karir mereka, pendidikan, visi dan misi, hingga latar belakang keluarga. Pilkada juga menghadirkan kesempatan bagi para pemuda untuk ikut aktif dalam proses demokrasi, sehingga mereka dapat memikul tanggung jawab terhadap pembangunan daerah.

c. Menjamin keadilan dan demokrasi

Dengan hadirnya pilkada, setiap pemuda mempunyai kesempatan yang sama dalam menentukan pilihan politiknya. Pilkada ini bermanfaat dalam mewujudkan keadilan dalam proses pemilihan dan menjaga stabilitas demokrasi dalam pemerintahan.

d. Memperkuat stabilitas politik

Pilkada yang dilakukan setiap lima tahun sekali pasca reformasi membantu memperkuat stabilitas politik di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Dengan adanya mekanisme pemilihan yang jelas, akan mencegah terjadinya ketegangan politik dan konflik yang dapat memunculkan keresahan dalam masyarakat. Jadi manfaat pilkada dengan adanya pembentukan dan pergantian pemimpin dilakukan secara teratur, dapat pula menjaga stabilitas pemerintahan di daerah.

e. Membangun kepercayaan publik

Proses pilkada yang jujur dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan pemerintahan. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa kestabilan ekonomi dan sosial sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan.

f. Pertanggungjawaban pemimpin

Melalui pilkada, gubernur dan walikota sebagai pemimpin di wilayahnya dipilih langsung oleh rakyat, sehingga terwujud pertanggungjawaban untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin yang berkapasitas dan bersih dari perilaku KKN serta menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

g. Pentingnya suara rakyat

Pilkada juga bermanfaat untuk menghadirkan akan pentingnya suara rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Pilkada merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara dari pemuda mempunyai bobot yang sama dalam menentukan arah pembangunan di daerah.

Dengan demikian, partisipasi pemuda sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam pilkada sangat besar implikasinya terhadap seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu penting bagi pemuda untuk ikut serta dalam proses dan tahapan-tahapan pilkada mulai dari pemberian perhatian terhadap para calon gubernur/wakil gubernur dan walikota/wakil walikota sampai pada menyalurkan hak suaranya di TPS hingga pengawasan penghitungan suara dan penetapan pemenang pilkada. Partisipasi pemuda dalam pilkada turut pula memberikan sumbangsih terhadap perwujudan pemerintahan yang efektif, mampu melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Tanjung Dapur dengan menempatkan pemuda sebagai mitra ternyata mendapat sambutan yang antusias dari mereka. Para peserta mengikuti kegiatan ini secara serius yang dibuktikan dengan keaktifan mereka menyampaikan pendapat dan pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pilkada untuk memilih gubernur/wakil gubernur dan walikota/wakil walikota. Setelah memperoleh informasi akan pentingnya pilkada, maka para pemuda berkomitmen untuk terlibat aktif dalam proses pilkada, termasuk memperhatikan visi misi dan program yang ditawarkan oleh pasangan calon. Para pemuda pun tetap berkomitmen untuk mengikuti kegiatan serupa dengan harapan dapat menambah wawasan mereka yang terkait dengan kondisi sosial kemasyarakatan di sekitar mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewanti, A. M., & Sari, M. M. K. (2021). Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Pada Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 704-718.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi

- Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1).
- Harefa, D., & Hulu, F. (2020). *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. Pm Publisher.
- Ismi, F. (2024). *Angka Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024 Capai 83,6 Persen*. PORTALJABARPROVGID. <https://jabarprov.go.id/berita/angka-partisipasi-masyarakat-pada-pemilu-2024-capai-83-6-persen-13006>
- Miranti, M., & Bahri, S. (2023). Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Terhadap Masyarakat. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 35-47.
- Mutmainah, S., Widayati, U., & Fikram, M. (2023). Menghadapi Tantangan Digital: Kontribusi Workshop dalam Meningkatkan Kewaspadaan Remaja di SMAS Muhammadiyah Ambalawi. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 141-146.
- Rahman, A. (2022). Memperkuat Kearifan Lokal Di Kalangan Orang Bugis Dalam Menangkal Krisis Identitas. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 383-392.
- Rizal, A. (2022). Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. *Indonesian Annual Conference Series*, 136-140.
- Sutriawan, S., Khatimah, N. H., & Sanusi, G. (2023). Sosialisasi Pentingnya Menjaga Privasi Dan Keamanan Data Di Era Digital. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-14.
- Yanti, R. R. Y. R. R., Afifah, A., Bayin♦Atiqoh, L., & Abdulloh, I. (2021). Pseudo Demokrasi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1(2), 122-132.
- Zuhro, S. (2021). Demokrasi dan Kepemimpinan Transformatif. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(2), 359-374.